



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 4946-4961

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Kerja Sama Baznas (Bazis) Jakarta dan Perusahaan dalam Program "Semua Bisa Makan"

Khafipah Lidiana Siregar<sup>1✉</sup>, Bambang Shergi Laksmono<sup>2</sup>

Universitas Indonesia, Indonesia

Email: [khafifahlidianas@gmail.com](mailto:khafifahlidianas@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi dampak dan efektivitas kerja sama antara Baznas Jakarta dan perusahaan dalam mendukung program kesejahteraan "Semua Bisa Makan" serta menganalisis kontribusi konkret yang diberikan terhadap efisiensi distribusi bantuan pangan dan kesejahteraan masyarakat penerima manfaat. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dalam dua tingkat, yakni (1) prosedur umum analisis data seperti transkripsi dan pemberian kode; dan (2) analisis tahapan-tahapan yang terkait dengan desain kualitatif spesifik. Hasil penelitian menunjukkan keberhasilan dalam menciptakan dampak positif baik bagi penerima manfaat maupun citra positif perusahaan. Kerjasama ini tidak hanya mengoptimalkan pendistribusian bantuan, tetapi juga meningkatkan keterlibatan aktif perusahaan dalam tanggung jawab sosial. Simpulan ini menegaskan pentingnya kerja sama sektor publik dan swasta dalam mendukung program-program kesejahteraan, menyoroti potensi besar untuk memberikan solusi berkelanjutan terhadap isu-isu kemanusiaan dan keberlanjutan sosial.

Kata Kunci: Baznas, Kerja Sama, Perusahaan, Program Kesejahteraan, "Semua Bisa Makan"

## Abstract

The aim of this research is to evaluate the impact and effectiveness of collaboration between Baznas Jakarta and companies in supporting the "Semua Bisa Makan" welfare program and to analyze the concrete contribution made to the efficiency of food aid distribution and the welfare of the beneficiary communities. This research method uses a qualitative approach with descriptive research type. Data collection techniques in this research are through observation, interviews and documentation. This research uses two types of data, namely primary data and secondary data. The data analysis techniques in this research were carried out at two levels, namely (1) general data analysis procedures such as transcription and coding; and (2) analysis of the stages associated with a specific qualitative design. The research results show success in creating a positive impact for both beneficiaries and a positive image of the company. This collaboration not only optimizes the distribution of aid, but also increases the company's active involvement in social responsibility. This conclusion emphasizes the importance of public and private sector cooperation in supporting welfare programs, highlighting the great potential to provide sustainable solutions to humanitarian and social sustainability issues.

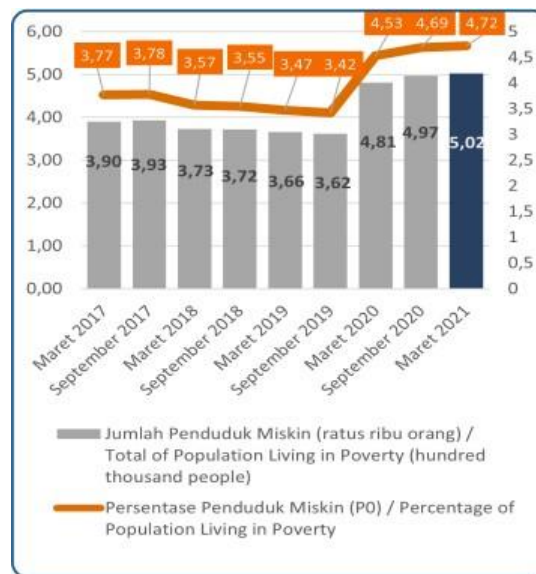
Keyword: Baznas, Cooperation, Company, "Semua Bisa Makan", Welfare Program

## PENDAHULUAN

Kerawanan pangan menjadi masalah umum yang terjadi pada masyarakat miskin kota, terutama ketika pandemi Covid-19 melanda dunia. Terhentinya kegiatan ekonomi untuk mencegah penyebaran virus corona yang lebih luas telah menyebabkan banyak rumah tangga menjadi kekurangan, bahkan kehilangan pendapatan. Masyarakat yang sebelumnya telah mengalami kerentanan menjadi semakin rentan (Sani et al., 2022). Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat peningkatan signifikan kemiskinan dan pengangguran di awal pandemi yang naik menjadi 10,19 persen (kemiskinan) dan 7,07 persen (pengangguran terbuka) pada kuartal 3 tahun 2020. Wilayah perkotaan menjadi yang paling terdampak oleh kejadian ini. Sani *et al.*, (2022) menuturkan bahwa bidang usaha yang banyak dijalankan di perkotaan seperti transportasi, industri pengolahan, perdagangan, pariwisata dan perhotelan, dan lainnya terdampak langsung oleh pembatasan mobilitas oleh pemerintah. Hal tersebut menyebabkan kemiskinan dan tingkat pengangguran meningkat signifikan di perkotaan sehingga meningkatkan tingkat kerawanan pangan.

Jakarta sebagai kota metropolitan terbesar yang menjadi pusat bisnis dan ekonomi di Indonesia terkena hantaman keras dari pandemi Covid-19. Berdasarkan catatan BPS DKI Jakarta, persentase penduduk miskin di Jakarta meningkat dari 3,62 juta orang (3,42%) pada September 2019 menjadi 4,81 juta orang (4,53%) pada Maret 2020, lalu terus meningkat hingga mencapai puncaknya pada bulan Maret 2021 mencapai 5,02 juta orang atau 4,72 persen. Kondisi tersebut diperparah oleh realita masyarakat miskin Jakarta yang mayoritasnya bekerja di lapangan usaha

aktivitas jasa lainnya atau pekerja informal (37,5%), membuat mereka semakin sulit keluar dari kemiskinan (Badan Pusat Statistik DKI Jakarta, 2021).



Gambar 1. 1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin DKI Jakarta, 2017-2021

Sumber : Badan Pusat Statistik DKI Jakarta (2021)

Bulan	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)			Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin (%)
	Makanan	Non-Makanan	Jumlah		
September 2018	408,791	198.987	607.77	372,26	3,55
	(67,26%)	(32,74%)	(100%)		
Maret 2019	429,915	207.345	637.26	365,55	3,47
	(67,46%)	(32,45%)	(100%)		
September 2019	451.918	211.437	663.35	362,30	3,42
	(68,13%)	211.437	(100%)		
Maret 2020	466 156	214 245	680	480,86	4,53
	(68,51%)	(31,49%)	(100%)		
September 2020	467 847	215 491	683	496,84	4,69
	(68,46%)	(31,84%)	(100%)		

Maret 2021	479 332	218 306	697 638	501,92	4,72
	(68,71%)	(31,29%)	(100%)		
September 2021	490 918	224 134	715 052	498,29	4,67
	(68,65%)	(31,35%)	(100%)		
Maret 2022	508 239	230 716	738 955	502,04	4,69
	(68,78%)	(31,22%)	(100%)		
September 2022	534 819	238 551	773 370	494,93	4,61
	(69,15%)	(30,85%)	(100%)		

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta (2023)

Salah satu dampak fundamental dari kemiskinan adalah kerawanan pangan (*food insecurity*). Kerawanan pangan akut dapat mengantarkan pada kelaparan. Mengakhiri kelaparan merupakan tujuan kedua dalam misi *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang digagas oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). Mengacu pada penjelasan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), kelaparan merupakan suatu kondisi hasil dari kurangnya konsumsi pangan kronik. Menurut Maslow (1954, dalam Lester, 2013), pangan merupakan kebutuhan paling fundamental yang menjadi motivasi bagi setiap insan manusia untuk melakukan upaya-upaya untuk mendapatkannya. Kebijakan pembatasan sosial berskala besar membutuhkan partisipasi seluruh warga supaya tetap berdiam di rumah. Namun, bagaimana masyarakat bisa beraktivitas hanya dari rumah apabila mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan makanannya?.

Beberapa faktor utama yang menyebabkan kerawanan pangan di suatu wilayah adalah ketiadaan subsidi pangan, peningkatan harga pangan, menurunnya pendapatan riil, serta tingginya angka pengangguran (Kementerian PPN/Bappenas, 2019). Semua hal tersebut terjadi ketika pandemi Covid-19 melanda Indonesia. Menurut Paramashanti (2020), tantangan terbesar dalam penanganan kerawanan pangan selama pandemi adalah sistem produksi-distribusi makanan yang terganggu akibat kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), bertambahnya beban masyarakat yang sebelumnya telah kesulitan mengakses makanan, serta kurangnya ketersediaan makanan bergizi. Bila masyarakat tidak segera diberikan bantuan dengan makanan yang bergizi, dikhawatirkan tingkat malnutrisi dan *stunting* meningkat, serta menjadi ancaman bagi stabilitas sosial (Sukarma et al., 2023). Pemerintah daerah sendiri ikut

menyalurkan bantuan menggunakan dana yang bersumber dari APBD, misalnya Bansos PSBB di DKI Jakarta dengan anggaran sebesar Rp 5,3 triliun, Bansos Pemprov Jabar di Jawa Barat dalam bentuk tunai dan sembako yang menjangkau 1,3 juta keluarga, bansos warga miskin di Jawa Tengah dalam bentuk bahan makanan pokok yang menjangkau 1,8 juta warga miskin dan rentan miskin, serta Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Jawa Timur dalam bentuk sembako yang menjangkau 2,38 juta keluarga (Andriyana & Jowono, 2021).

Berbagai inisiatif masyarakat juga muncul untuk membantu warga yang mengalami kerawanan pangan. Salah satu bentuk inisiatif adalah memberikan bantuan berupa makanan siap santap atau yang biasa dikenal dengan sebutan *charitable meal program* (program bantuan makanan). Menurut Dachner *et al.* (2009), program semacam ini muncul sebagai respons atas situasi kerawanan pangan yang menjerat masyarakat miskin dan tunawisma dengan tujuan utama untuk meredakan rasa lapar mereka. Beberapa contoh inisiatif bantuan makanan selama pandemi Covid-19 dilakukan oleh sebuah keluarga di Surabaya (Henry, 2020); Bentuk lain inisiatif adalah membagikan bahan makanan atau biasa disebut sebagai *emergency food assistance* (asistensi pangan darurat), yakni pemberian bahan makanan bagi masyarakat yang tidak mampu dan dalam keadaan darurat pangan (Riches & Silvasti, 2014).

Perusahaan-perusahaan juga ikut serta dalam kegiatan gotong-royong semacam ini. Banyak perusahaan yang melakukan kegiatan berbagi makanan dengan mengalokasikan dana *corporate social responsibility* (selanjutnya disebut CSR). CSR secara umum dipahami sebagai cara sebuah organisasi mengintegrasikan fokus sosial, lingkungan, dan ekonomi ke dalam nilai-nilai budaya, pengambilan keputusan, strategi, dan operasi mereka, dengan sikap yang transparan dan akuntabel, sehingga dapat membangun praktik yang lebih baik dalam organisasi, serta menciptakan peningkatan dan kesejahteraan bagi masyarakat (Hohnen & Potts, 2007, pp. 3). Hampir seluruh perusahaan melakukan kegiatan CSR untuk merespon situasi sosial yang terjadi di sekitar wilayah operasinya selama pandemi Covid-19. Misalnya, Bank Mayapada membagikan makanan bagi para pekerja informal seperti pengemudi ojek daring, petugas kebersihan, dan warga sekitar yang lewat di kawasan Sudirman, Jakarta (Faritzky, 2020). Momentum seperti ini turut dimanfaatkan oleh organisasi non-profit untuk membantu para perusahaan yang ingin menyalurkan dana CSR untuk pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan makanan, seperti yang dilakukan CIMB Niaga Syariah dengan Dompot Dhu'afa di Medan (Syukuri, 2020).

Sebuah inisiatif dilakukan oleh organisasi non-profit (selanjutnya disebut ONP) bentukan pemerintah, Badan Amil Zakat Nasional (BAZIS) DKI Jakarta (selanjutnya disebut BAZNAS (BAZIS) Jakarta yang membentuk sebuah program amal makanan (*charitable meal program*) yang diberi nama "Semua Bisa Makan". Program ini merupakan wadah bagi perusahaan yang

ingin melakukan kegiatan CSR dalam bentuk pembagian makanan siap santap. Program ini diluncurkan pada tahun 2021 dengan menyoar dua penerima manfaat, yaitu pengusaha makanan yang ditunjuk sebagai vendor penyedia makanan dan warga penerima makanan. Menurut Gubernur DKI Jakarta 2017- 2022 Anies Baswedan, program Semua Bisa Makan adalah sistem yang mempertemukan antara pihak yang membutuhkan dengan pihak yang ingin memberikan sedekahnya. Tidak sekedar membagikan makanan, program ini juga memberdayakan warung-warung makan sederhana yang ada di sekitar Jakarta agar dapat beroperasi di tengah menurunnya daya beli.

Terdapat celah penelitian (research gap) berdasarkan peninjauan penelitian- penelitian yang telah dilakukan. Penelitian mengenai penanganan kerawanan pangan telah membahas soal situasi kerawanan pangan di masa pandemi Covid-19 (Barker & Russell, 2020; Jones et al., 2021), dan program pembagian makanan yang dilakukan oleh para aktivis sosial (Afrianty & Listyaningsih, 2018; English et al., 2021; Pine et al., 2022). Penelitian terapan yang dilakukan English et al., (2021) yang berkolaborasi dengan banyak pihak untuk menyalurkan makanan bagi para isoman (penderita) Covid-19 mirip dengan apa yang dilakukan BAZNAS (BAZIS) Jakarta, tetapi tidak menyinggung soal keterlibatan perusahaan dalam pelaksanaannya. Penelitian mengenai program sosial di masa pandemi Covid-19 telah membahas upaya-upaya dalam menyelesaikan beragam jenis masalah sosial yang muncul, seperti pendidikan (Ridwan et al., 2022) dan kerawanan pangan (Abdullah & Pratiwi, 2021; Probosiwi & Putri, 2021; Syah et al., 2022), tetapi juga belum menyinggung keterlibatan pelaku usaha dalam implementasi. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam usaha dalam mengatasi kerawanan pangan yang ada di Jakarta melalui skema kerja sama ONP-perusahaan.

Penelitian mengenai pengelolaan CSR telah membahas beragam aspek, mulai dari dorongan pemerintah (Furqoni & Rosyadi, 2019; Sitepu & Maulana, 2021), proses perencanaan (Kolopaking et al., 2019; Widhagha et al., 2019), dan implementasi program (Susilo et al., 2022). Penelitian Susilo et al. (2022) membahas peran organisasi non-profit dalam menyalurkan dana CSR dari perusahaan kepada penerima manfaat, tetapi belum membahas secara mendalam pengembangan kerja sama NPO-perusahaan. Penelitian yang membahas program "Semua Bisa Makan" yang dicetuskan oleh BAZNAS (BAZIS) Jakarta juga belum pernah dilakukan sebelumnya.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan program-program sosial yang memanfaatkan kerja sama lintas sektor, khususnya kerja sama antara organisasi non-profit (ONP) dengan perusahaan. Kerangka analisis pengembangan kerja sama ONP-perusahaan yang dikembangkan penelitian ini diharapkan dapat membantu ONP dan perusahaan yang akan atau sedang menjajaki prospek kerja sama dalam pelaksanaan program

sosia melalui skema *corporate social responsibility* (CSR).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif berasumsi bahwa dimensi subyektif dari pengalaman manusia terus berubah dan tidak dapat dipelajari dengan menggunakan prinsip-prinsip dari metodologi penelitian kuantitatif (Neuman, 2014, p. 20). Allen-Meares dan Lane (1990) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif memandang dunia sosial sebagai realitas dinamis yang sangat kompleks, terdiri dari beragam lapisan makna dan perspektif yang sangat dipengaruhi oleh interaksi antara konteks lingkungan dan interpretasi subyektif para pelaku. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti dapat memberikan penjelasan komprehensif mengenai kerja sama antara BAZNAS (BAZIS) Jakarta dan perusahaan-perusahaan dalam program Semua Bisa Makan.

Jenis penelitian deskriptif dipilih karena penelitian ini ingin menyajikan gambaran yang detail dan akurat mengenai program "Semua Bisa Makan". Sebagaimana dijelaskan Neuman (2014), penelitian deskriptif menampilkan gambaran yang spesifik dan detail mengenai situasi, latar sosial, atau hubungan (hlm. 38). Strategi penelitian yang digunakan adalah fenomenologi yang dapat menjelaskan pengalaman hidup para aktor yang terlibat dalam suatu fenomena (Creswell, 2014, p. 54). Pemilihan strategi fenomenologi dibandingkan studi kasus adalah karena penelitian ini fokus mengkaji kerja sama antara BAZNAS (BAZIS) Jakarta sebagai ONP dan perusahaan-perusahaan yang menjadi sebuah fenomena yang terjadi dalam pergerakan penganganan kerawanan pangan di DKI Jakarta. Penggunaan strategi fenomenologi dapat membantu peneliti untuk mengajukan pertanyaan secara lebih kritis dan mendalam agar dapat menjelaskan fenomena secara komprehensif.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*). Dalam penelitian kualitatif, wawancara dilakukan dengan bertemu langsung dengan informan, baik secara tatap muka maupun melalui saluran komunikasi jaringan (telepon/konferensi video), supaya dapat saling berinteraksi dan mengambil pandangan dan opini dari informan (Creswell, 2014, p. 316). Lebih lanjut, Bryman (2012) menjelaskan bahwa data yang terkumpul berupa data yang terstruktur maupun tidak terstruktur dan dikumpulkan oleh peneliti dengan merekam ataupun mencatat poin-poin percakapan di buku catatan. Data sekunder didapatkan melalui studi dokumen. Ketika melakukan penelitian kualitatif, peneliti dapat mengumpulkan dokumen-dokumen kualitatif, baik itu dokumen publik maupun dokumen pribadi.

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dalam dua tingkat, yakni (1) prosedur

umum analisis data seperti transkripsi dan pemberian kode; dan (2) analisis tahapan-tahapan yang terkait dengan desain kualitatif spesifik. Dalam penelitian studi kasus, data pertama kali dianalisis dengan menyajikan deskripsi detail mengenai konteks atau individu, lalu dilanjutkan dengan analisis berdasarkan tema atau isu (Creswell, 2014, p. 325).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Berdasarkan penuturan para informan, terkait kerja sama dalam Program Semua Bisa Makan, ternyata Baznas Bazis dan kelima perusahaan memang melewati tahapan yang kurang lebih sama. Mereka memang membahas tentang jenis atau bentuk kerja samanya. Mereka juga mengkaji tentang masalah yang melatar belakangi kemunculan Program SBM. Kemudian mereka pun membahas tentang kebutuhan dana sebagai kontribusi perusahaan. Hanya saja pada kasus program ini, Baznas Bazis menyampaikannya secara detil melalui proposal.

Apabila merangkum pernyataan para informan, dapat diketahui bahwa setidaknya ada 2 target utama Program Semua Bisa Makan. Pertama yakni terbaginya 1 juta piring kepada para mustahik, yakni Warga DKI Jakarta yang mengalami kesulitan dalam pemenuhan kebutuhannya terutama untuk makan sehari-hari, dan yang kedua yakni terbantunya UMKM warga yang berbentuk warung makan sebab diikutsertakan berpartisipasi dalam penyediaan makanan.

Melalui analisis terhadap penyampaian para informan dari Baznas Bazis, dapat diketahui pula sebuah fakta bahwa sebenarnya Baznas Bazis belum mencapai salah satu target utama mereka. Yakni target menyalurkan 1 juta piring kepada para mustahik. Sejauh ini mereka masih menyalurkan seperempatnya, yakni sekitar 250 ribu piring. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan, hal ini terjadi sebab dari Agustus hingga saat ini program masih dijeda sampai maintenance website Baznas Bazis selesai. Sementara target membantu usaha makan warga setingkat UMKM dengan pengikutsertaan program sudah tercapai.

Apabila pendapat para informan dari Baznas Bazis disimpulkan, maka ditemukan garis merah bahwa tujuan utama Program Semua Bisa Makan yakni menyalurkan zakat, infaq, sedekah masyarakat, dan CSR perusahaan kepada warga DKI Jakarta yang kesulitan untuk pemenuhan kebutuhan makan sehari-harinya, serta mendukung usaha warung makan milik yang terdampak kesulitan ekonomi.

Selanjutnya menganalisis penuturan para informan tentang karakter manfaat Program Semua Bisa Makan, maka ditemukan sejumlah informasi inti bahwa awalnya program dimaksudkan agar memberi manfaat kepada warga Jakarta yang terdampak Covid-19, sehingga kesulitan untuk makan sehari-hari. Belakangan, untuk menerima manfaat dari program ini tidak harus dikaitkan dengan dampak Covid 19. Belakangan dhuafa, pemulung, fakir miskin, petugas

kebersihan, ojek online, lansia, buruh yang mengalami kesulitan makan jadi penerima manfaat Program Semua Bisa Makan asalkan memang mengalami kesulitan untuk makan sehari-hari. Selain itu warung makan UMKM milik warga yang ikut serta juga menerima manfaat dari program ini.

Merujuk pada Kotler dan Lee (2005), ada beberapa pertimbangan yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi masalah dan merumuskan inisiatif, termasuk salah satunya seberapa penting atau mendesak masalah itu untuk ditangani. Program Semua Bisa Makan sendiri dimulai pada bulan Oktober 2021, tatkala kasus pandemi Covid 19 sangat tinggi dan salah satunya juga memberikan begitu banyak dampak negatif pada ekonomi termasuk warga DKI Jakarta. Memburuknya perekonomian ini bahkan menyebabkan tidak sedikit yang mengalami kesulitan untuk sekadar makan sehari-hari. Kegentingan itulah yang menyebabkan inisiatif program solutif seperti program Semua Bisa Makan tercipta.

Perwakilan Paragon juga mengatakan bahwa mereka punya kesadaran akan tanggung jawab membeli kembali ke masyarakat. Selain itu pionir perusahaan juga mengajarkan untuk berbagi agar usaha diberkahi. Karenanya cukup sama dengan JNE, kepentingan mereka adalah menjalankan value perusahaan yang diajarkan founder Paragon. Selain itu mereka juga mengakui bahwa dukungan pada program yang disiarkan media local dan nasional juga bisa meningkatkan value perusahaan di mata publik serta membentuk persepsi masyarakat bahwa membeli produk-produk Paragon sama dengan membantu masalah sosial yang ada. Hal demikian ternyata juga bisa meningkatkan penjualan.

Perwakilan BP Jamsostek juga menuturkan bahwa mereka hanya melaksanakan kewajiban untuk peduli ketika masyarakat sedang membutuhkan atau berada dalam kesulitan. Sekalipun demikian, ia juga mengakui bahwa acara launching pada Oktober 2021 lalu telah meningkatkan reputasi perusahaan mereka meski tidak signifikan. Yakni dikenal sebagai BUMN dengan kepedulian sosial. Selain itu mereka juga mendapatkan kesempatan untuk menyosialisasikan layanannya kepada para pemilik perusahaan untuk mengasuransikan para pekerjanya.

Berikutnya perwakilan PII juga menyampaikan bahwa salah satu core value CSR mereka adalah memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Artinya kepentingan mereka ikut serta berkontribusi sebagai pendana Program Semua Bisa Makan adalah demi mewujudkan core value tersebut. Meskipun demikian, ia juga mengakui bahwa aktif dalam kegiatan sosial yang tidak luput dari pemberitaan media telah meningkatkan reputasi perseroan mereka di mata investor dan publik.

Terakhir, perwakilan Maybank juga menegaskan bahwa sejak dulu mereka sadar akan tanggung jawab untuk berperan aktif dalam pengembangan sosial-ekonomi masyarakat. Karenanya kepentingan mereka berperan dalam Program Semua Bisa Makan hanya sebatas

menjalankan tanggung jawab tersebut. Selain itu ia juga mengakui bahwa sorotan dan liputan awak media saat launching program tahun 2021 lalu telah berdampak baik bagi mereka.

Apabila analisisnya dikerucutkan, secara keseluruhan dapat ditarik sebuah benang merah bahwa kelima perusahaan setidaknya memiliki 2 kepentingan dalam Program Semua Bisa Makan. Pertama, kepentingan yang tidak bersifat profitable yaitu mewujudkan core value, nilai luhur, tanggung jawab dan kebiasaan perusahaan sejak dulu. Kedua, kepentingan yang bersifat profitable yaitu kesempatan mempromosikan produk dan layanan serta menaikkan reputasi dan value perusahaan.

Menurut Da Silva & Fontana (2023), sangat penting bagi pihak ONP maupun perusahaan untuk memahami bahwa pihak yang hendak diajak bekerja sama mempunyai kompetensi di bidangnya. Terutama perusahaan ke ONP. Sangat penting bagi perusahaan untuk mengetahui terlebih dahulu bahwa badan atau lembaga yang akan didanainya memang berkompetensi dalam membuat program sosial. Jika tidak ada kompetensi tersebut, maka pihak ONP dianggap hanya akan menyelewengkan dana yang diberikan dan pihak perusahaan akan menarik diri dari kemitraan.

Apabila dianalisis dengan seksama, ditemukan serangkaian informasi yang menggambarkan bahwa sumber daya yang paling dibutuhkan dari perusahaan adalah uangnya. Lebih tepatnya bila diartikan dana CSR perusahaan. Selain dana, perusahaan tidak perlu menyediakan sumber daya lainnya sebab semua implementasi program lainnya sudah diurus oleh Baznas Bazis. Meskipun begitu, ditemukan pula sebuah fakta bahwa pihak Baznas Bazis sebenarnya tidak pernah melarang atau menutup kesempatan bagi perusahaan yang ingin berkontribusi aktif di lapangan. Sebagaimana ketika mereka memperbolehkan PII untuk ikut ke lapangan dan melakukan pengecekan keadaan dapur dan merevitalisasi peralatan masak warung makan yang menjadi Program SBM. Sekalipun ada yang aktif, namun mayoritas perusahaan lainnya hanya menjadi penyumbang dana dan menyerahkan urusan praktek lapangannya kepada Baznas Bazis.

Salah satu perwakilan juga perusahaan juga memberikan pernyataan bahwa mereka percaya bahwa Baznas Bazis memiliki sumber daya manusia yang kompeten dan amanah, dengan metode yang sistematis dan terorganisir, serta mempunyai data dan informasi tentang masalah yang ingin diatasi dengan programnya. Apabila dirangkum, maka muncullah sebuah garis merah bahwa kedua belah pihak memutuskan untuk bekerja sama sebab adanya kepercayaan akan ketersediaan sumber daya.

Sebelum membuka kesempatan kerja sama, umumnya ONP memiliki sejumlah kriteria perusahaan yang menjadi kolaborator. Namun ternyata tidak begitu halnya dengan Baznas Bazis. Apabila menganalisa keterangan dari para informan di Baznas Bazis, akan tergambar

sebuah fakta bahwa mereka sebenarnya tidak mempunyai kriteria khusus apapun untuk setiap perusahaan yang ingin berkontribusi dalam setiap program yang diluncurkan. Begitu pula halnya dengan kelima perusahaan yang berkontribusi dalam Program Semua Bisa Makan.

Beberapa dari informan di pihak Baznas Bazis berspekulasi jikapun ada hal yang membahayakan Baznas Bazis, maka akan berbentuk pengendalian program oleh kepentingan perusahaan sehingga program tidak lagi berjalan sesuai core value. Dalam kata lain, terjadi independensi pembajakan ONP sebagaimana yang disampaikan Baur dan Schmitz (dalam Austin & Seitanidi, 2012a:735). Apabila manipulasi itu cenderung negatif, maka kemungkinan bisa merusak citra Baznas Bazis. Seperti halnya dugaan kasus penggunaan bantuan untuk kepentingan partai yang pernah terjadi di Jawa Tengah. Yakni dugaan penggunaan bantuan Baznas Bazis untuk kader PDIP.

Dengan ini dapat ditarik sebuah benang merah bahwa sejauh ini Baznas Bazis belum pernah mengalami sesuatu yang membahayakan dari hasil kerja sama program dengan perusahaan. Namun kemungkinan hal tersebut terjadi tetap ada dan diperhitungkan. Sebab memang dugaan kasusnya sudah pernah terjadi, yakni penyelewengan bantuan bukan kepada target mustahik seharusnya.

Jika dianalisis mendalam akan ditemukan sebuah benang merah, bahwa alasan mereka percaya mengalokasikan dana CSRnya untuk Program Semua Bisa Makan yakni sebab Baznas Bazis mempunyai reputasi yang cukup baik. Selain itu juga bekerja sama dengan Pemerintahan Provinsi Jakarta dan beberapa kali diberitakan media lokal maupun nasional tentang program sosial yang mereka gelar.

Yuan et al (2012) mengatakan bahwa Key Performance Indicators atau KPI merupakan sebuah alat yang digunakan dalam pengukuran dan pengaturan kinerja suatu proyek atau organisasi. Langkah awal dari penyusunan KPI yakni berangkat dari goals atau tujuan program itu dilaksanakan. Setidaknya ada 2 jenis goals yang umumnya dikuantifikasi dalam KPI. Yaitu fundamental goals dan strategic goals. Fundamental goals merupakan tujuan paling utama dalam pelaksanaan program sosial, yaitu menyelesaikan permasalahan sosial. Sedangkan, strategic goals merupakan tujuan strategis yang ingin dicapai baik oleh ONP maupun perusahaan (Da Silva & Fontana, 2023).

Berdasarkan analisis terhadap penuturan para informan dari Baznas Bazis, dapat digambarkan sejumlah informasi bahwa sebenarnya KPI program bagi mereka itu cukup sederhana. Pertama yakni ketika program yang dijalankan berhasil adalah keberhasilan program itu sendiri. Sebab menurut mereka, program muncul karena memang ada masalah. Maka indikator keberhasilannya adalah ketika masalah makan sehari-hari Warga Jakarta bisa diselesaikan atau setidaknya dikurangi. Indikator kedua yakni ketika dana CSR dari perusahaan

dapat dialokasikan seefektif mungkin untuk tujuan program, yakni membantu memenuhi kebutuhan makan sehari-hari Warga DKI Jakarta.

Lalu jika dianalisis lagi, ada 3 indikator tambahan dari divisi distribusi yang bentuknya hampir sama dengan 2 indikator sebelumnya. Pertama, apabila pendistribusian tepat sasaran, yakni memang menjangkau orang-orang yang paling membutuhkan. Kedua, apabila tepat waktu, yakni bantuan makan gratis diberikan ketika problem sedang memuncak dan bantuan benar-benar sangat dibutuhkan. Ketiga, apabila tepat sasaran, yakni makanan yang didistribusikan pihak warung sesuai standar gizi yang telah disepakati.

Melalui analisa mendalam, ternyata mereka punya KPI tersendiri untuk menilai efektivitas Program Semua Bisa Makan. Indikasi pertama yakni adanya aksi nyata. Dalam kata lain, Baznas Bazis harus ada gerakan konkrit melaksanakan Program SBM. Indikasi berikutnya yakni tercapai tidaknya tujuan sebagaimana yang terlampir di proposal. Jika permasalahan yang ingin diatasi program bisa terselesaikan, artinya program itu berjalan efektif. Indikasi ketiga yaitu tergantung Program SBM dijalankan sesuai core value dan campaign perusahaan atau tidak. Ada juga perusahaan yang membuat indikator tergantung pada poin terbantu atau tidaknya masyarakat yang membutuhkan. Terakhir yakni indikator pada kualitas program. Apabila diperhatikan, kelima indikasi ini hanya dapat diketahui dengan observasi langsung ke lapangan serta memperhatikan laporan rutin yang dikirimkan pihak oleh Baznas tentang progres program.

Berdasarkan analisis mendalam atas penyampaian kelima perwakilan perusahaan, ditemukan sejumlah informasi inti bahwa tidak ada satupun dari kelima perusahaan itu yang tidak melakukan pengawasan program. Dapat disimpulkan juga bahwa hanya 2 dari 5 perusahaan yang sesekali mengirimkan orangnya untuk mengecek langsung kondisi warung yang menjadi mitra Program Semua Bisa Makan. Selebihnya hanya memantau melalui laporan per dua bulan yang diberikan Baznas Bazis.

Berdasarkan analisis mendalam yang dilakukan terhadap penyampaian para informan, dapat ditemukan sejumlah informasi inti. Pertama, Baznas Bazis mengakui bahwa evaluasi program adalah hal yang sangat perlu dilakukan. Sebab dengan evaluasi, permasalahan dapat ditemukan dan dicari solusinya. Dengan evaluasi juga dapat diketahui progres program dengan membandingkan pencapaian sebelumnya dengan pencapaian terakhir. Selain itu, peran evaluasi juga sangat penting bagi perusahaan kontributor, karena itu menunjukkan bahwa Baznas Bazis tidak lepas tangan dengan program yang mereka danai, melainkan tetap mengkaji kinerjanya dan bertanggung jawab.

Berdasarkan analisis mendalam yang dilakukan terhadap penyampaian para perwakilan perusahaan, dapat ditarik sejumlah informasi inti bahwa perusahaan memang melakukan evaluasi. Umumnya kelima perusahaan ini melakukannya setiap 3 atau 6 bulan sekali. Bukan saja

Program Semua Bisa Makan, tapi semua program yang mereka danai juga ikut dievaluasi.

Perusahaan melakukan evaluasi berdasarkan pada laporan rutin yang diberikan ONP. Dalam prosesnya mereka akan menimbang apakah suatu program itu masih layak untuk didanai atau tidak. Begitu pula halnya dengan Program Semua Bisa Makan. Dasar evaluasinya adalah laporan rutin per 2 bulan yang diberikan Baznas Bazis. Hanya saja saat ini tidak ada lagi evaluasi untuk Program SBM sebab sejak Agustus masih dalam proses jeda maintenance.

## SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kolaborasi antara Baznas Jakarta dan perusahaan dalam mendukung program kesejahteraan tersebut telah memberikan kontribusi signifikan terhadap efisiensi distribusi bantuan pangan kepada masyarakat yang membutuhkan. Hasilnya menunjukkan keberhasilan dalam menciptakan dampak positif baik bagi penerima manfaat maupun citra positif perusahaan. Kerjasama ini tidak hanya mengoptimalkan pendistribusian bantuan, tetapi juga meningkatkan keterlibatan aktif perusahaan dalam tanggung jawab sosial. Simpulan ini menegaskan pentingnya kerja sama sektor publik dan swasta dalam mendukung program-program kesejahteraan, menyoroti potensi besar untuk memberikan solusi berkelanjutan terhadap isu-isu kemanusiaan dan keberlanjutan sosial. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya adalah untuk mendalami dampak jangka panjang dari kerja sama ini, termasuk analisis berkelanjutan terhadap kesejahteraan masyarakat penerima manfaat, evaluasi keberlanjutan program, dan penelusuran potensi perbaikan dalam kerangka kerja kerja sama ini untuk memastikan dampak positif yang berkelanjutan dan optimal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A., & Pratiwi, R. I. (2021). Pemanfaatan Lahan Sebagai Pembantu Sumber Pangan Dan Pendapatan Pada Masa Pandemi Covid-19. *Transformatif: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 189–206.  
<https://doi.org/10.22515/tranformatif.v2i2.3955>
- Afrianty, A., & Listyaningsih. (2018). Peran Anggota Komunitas Berbagi Nasi (Bernas) dalam Membangun Sikap Peduli Sosial Masyarakat di Kota Mojokerto. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 6(1), 46–60.
- Andriyana, A., & Jowono, V. (2021). Multi-Level Governance in Public Policy In Indonesia. *Sosio Informa*, 7(3).
- Austin, J. E., & Seitanidi, M. M. (2014). *Creating Value in Nonprofit–Business Collaborations: New Thinking and Practice*. Jossey-Bass.

- Badan Pusat Statistik DKI Jakarta. (2021, July 15). *Masih di Tengah Pandemi, Pertumbuhan Penduduk Miskin Jakarta Melambat*. Berita Resmi Statistik. <https://jakarta.bps.go.id/pressrelease/2021/07/15/549/masih-di-tengah-pandemi-pertumbuhan-penduduk-miskin-jakarta-melambat.html>
- Barker, M., & Russell, J. (2020). Feeding the food insecure in Britain: learning from the 2020 COVID-19 crisis. *Food Security*, 12(4), 865–870. <https://doi.org/10.1007/s12571-020-01080-5>
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Fourth Ed). Sage Publications, Inc.
- Da Silva, A. N., & Fontana, M. E. (2023). A New Model to Consolidate Long-Term Intersectoral Partnerships in Humanitarian and Social Crises Management. *Public Organization Review*, 0123456789. <https://doi.org/10.1007/s11115-023-00731-3>
- Faritzky, J. (2020, May 8). FOTO: Bagi-Bagi Makanan Gratis untuk Warga Terdampak Covid-19. *Liputan6.Com*. <https://www.liputan6.com/photo/read/4248971/foto-bagi-bagi-makanan-gratis-untuk-warga-terdampak-covid-19?page=6>
- Furqoni, I., & Rosyadi, S. (2019). Collaborative Governance in Corporate Social Responsibility Forum in Banyumas Regency. *Jurnal Bina Praja*, 21, 209–217. <https://doi.org/10.21787/jbp.11.2019.209-217>
- Henry. (2020, November 1). Inspiratif, Keluarga Ini Bagikan Makanan Gratis Setiap Hari di Tengah Pandemi COVID-19. *Liputan6.Com*. <https://www.liputan6.com/citizen6/read/4397005/inspiratif-keluarga-ini-bagikan-makanan-gratis-setiap-hari-di-tengah-pandemi-covid-19>
- Hohnen, P., & Potts, J. (2007). *Corporate Social Responsibility: An Implementation Guide for Business*. International Institute for Sustainable Development.
- Jones, R. E., Walton, T. N., Duluc-Silva, S., & Fly, J. M. (2021). Household Food Insecurity in an Urban Food Desert: A Descriptive Analysis of an African American Community. *Journal of Hunger and Environmental Nutrition*, 17(5), 670–688. <https://doi.org/10.1080/19320248.2021.1926390>
- Kolopaking, L. M., Septianto, M., & Ambarita, E. (2019). The Synergy of Village Developing Management through Corporate Social Responsibility Activities (Studi Kasus PT . Indonesia Power , Gunung Salak). *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 10(3), 102–109.
- Kotler, P., & Lee, N. (2005). *Corporate Social Responsibility: Doing the Most Good for Your Company and Your Cause*. John Wiley & Sons, Inc.
- Lester, D. (2013). Measuring Maslow's hierarchy of needs. *Psychological Reports*, 113(1), 1027–1029. <https://doi.org/10.2466/02.20.PR0.113x16z1>

- Paramashanti, B. A. (2020). Challenges for Indonesia zero hunger agenda in the context of covid-19 pandemic. *Kesmas*, 15(2), 24–27.  
<https://doi.org/10.21109/KESMAS.V15I2.3934>
- Pine, A., de Souza, R., & Baumgartner, M. (2022). Reimagining the Food Shelf: Conceptualizing the Food Shelf as a Community Food Security Project. *Journal of Hunger and Environmental Nutrition*, 00(00), 1–19.  
<https://doi.org/10.1080/19320248.2022.2123265>
- Probosiwi, R., & Putri, A. L. (2021). Jogo Tonggo : Solidaritas Masyarakat di Era Pandemi Covid-19. *Sosio Konsepsia*, 10(2), 177–192.  
<https://doi.org/10.33007/ska.v10i2.2423>
- Riches, G., & Silvasti, T. (2014). *First World Hunger Revisited : Food Charity or the Right to Food?* Palgrave Macmillan.
- Ridwan, A., Sholihah, Q., & Wike. (2022). Implementasi Program Campus Social Responsibility (CSR) pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pendampingan Anak Rentan Putus Sekolah di Kota Surabaya). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 8(1), 23–34.
- Sani, S. R., Fitri, C. D., Amri, K., Muliadi, M., & Ikhsan, I. (2022). Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Pengangguran, Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan: Bukti Data Panel di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 6(1), 107.  
<https://doi.org/10.33087/ekonomis.v6i1.499>
- Sitepu, P. A. B., & Maulana, R. Y. (2021). Tata Kelola Program Corporate Social Responsibility (CSR) Melalui Konsep Collaborative Governance dalam Menunjang Program Pembangunan Daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 47(1), 80–90.  
<https://doi.org/10.33701/jipwp.v47i1>
- Sukarma, I. K., Karyasa, T. B., Hasim, H., Asfahani, A., & Azis, A. A. (2023). Mengurangi Ketimpangan Sosial Melalui Program Bantuan Pendidikan Bagi Anak-Anak Kurang Mampu. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(4), 8440–8447.
- Susilo, R. F. N., Zebua, E. P., Puspitasari, D., Utama, I. G. P. A., & Armandhani, H. (2022). Peran Organisasi Non-Profit (Social Project Bali) dalam Penyaluran CSR Perusahaan di Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Imagine*, 2(2), 58–63.  
<https://doi.org/10.35886/imagine.v2i2.453>
- Syah, H., Hasan, M., Kamaruddin, C. A., Nurdiana, N., & Nurjannah, N. (2022). Strategi Ketahanan Pangan dalam Program Urban Farming dalam Menunjang Keberlanjutan Usaha Keluarga di Masa Pandemi Covid-19. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 8(3), 1093.  
<https://doi.org/10.32884/ideas.v8i3.910>

- Widhagdha, M. F., Wahyuni, H. I., & Sulhan, M. (2019). Relasi Sosial Dalam Praktik Kebijakan CSR. *The Journal of Society & Media*, 3(1), 105. <https://doi.org/10.26740/jsm.v3n1.p105-125>
- Yuan, J., Wang, C., Skibniewski, M. J., & Li, Q. (2012). Developing Key Performance Indicators for Public-Private Partnership Projects: Questionnaire Survey and Analysis. *Journal of Management in Engineering*, 28(3), 252–264. [https://doi.org/10.1061/\(asce\)me.1943-5479.0000113](https://doi.org/10.1061/(asce)me.1943-5479.0000113)